

Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat

NURAINI ASRIATI¹, YOHANES BAHARI²

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, JL. Dipatiukur No. 1 Kalbar.
Email: ¹ nuraini_fkip@yahoo.co.id, ² yohanes@yahoo.co.id

Abstract

This study is about Social Control Based On Social Capital (A Case Study on Dayak-Malay-Madurese at Ketapang Regency, West Kalimantan). The aims of this study are: (1) To know how social interaction exists on multicultural communities at Ketapang Regency; (2) How is the social capital at multicultural communities at Ketapang Regency; (3) and How is the social control on multicultural communities at Ketapang Regency. The research method is a case study of multisitus. The observational and deep interview targets: government official leaders and staffs (Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun), traditional management or custom leaders, and multiethnic grass-roots. The research findings are: (1) the form of social capital on Dayak communities at Ketapang Regency is traditional law, whereas on Malay and Madurese communities, the form is tradition of musyawarah based on Islam law (2) preventively the social control by local community as social bonding was run by traditional leadership, religious leaders, interethnic communication forums, interreligion communication forums and other social institutions leadership; (3) repressively social control by local social capital as social bridging was run on law of Dayak custom, custom of ethnicity called "musyawarah bersendikan syariat Islam" on Malay and Madurese, and formal law implementation.

Kata kunci: Model Sosial Kontrol, local social capital.

I. PENDAHULUAN

Pada masa yang lalu, konflik kekerasan antaretnik di Kalimantan Barat sering terjadi dan cenderung semakin meningkat kekerasan dan intensitasnya. Sampai dengan tahun 2001, setidaknya tercatat beberapa konflik kekerasan yang melibatkan antaretnik, seperti Dayak-Madura 13 kali, Melayu-Madura 3 kali, Melayu-Cina 2 kali, Dayak-Cina 2 kali, dan Dayak-Melayu 2 kali (Alqadrie, 1999; Petebang *et al.* 2000;

Tim Peneliti Untan, 2000; Purwana, 2003; Giring, 2004; Bahari, 2005). Fakta itu menimbulkan stigma negatif bagi Kalimantan Barat karena dianggap sebagai daerah yang rawan konflik atau daerah yang tidak aman, akibatnya banyak investor tidak berminat menanamkan modalnya, lapangan kerja terbatas, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Stigma tersebut jika dibiarkan akan sangat merugikan keberlangsungan pembangunan, padahal

masih banyak daerah di Kalimantan Barat yang selama ini tidak terjamah konflik kekerasan tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Ketapang.

Secara demografis, masyarakat ini tidak berbeda dengan masyarakat di kabupaten-kabupaten lainnya yakni didiami berbagai latar belakang etnik. Tetapi secara sosiologis, ia tergolong sebagai masyarakat pluralis karena terdiri dari beragam etnik, status sosial dan ideologis. Mereka juga tergolong masyarakat multikultural karena adanya berbagai ragam sosial, budaya dan paham politik. Tiap etnik ini memiliki adat, bahasa dan agama yang berbeda. Fenomena kemajemukan dan multikultural seperti ini sebetulnya jamak dijumpai dimanapun di negeri ini.

Secara teoretis masyarakat pluralis sangat mudah mengalami konflik manakala tidak terdapat perekat sosial dan pengendalian sosial di dalamnya. Kenyataan inilah yang menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat di Kabupaten Ketapang tidak terlibat konflik kekerasan antar etnik atau dapat hidup rukun berdampingan padahal masyarakat di sekitarnya sering mengalami konflik.

Orang Dayak dan Melayu merupakan penduduk asli, yang membedakan keduanya hanya dalam keyakinan agama. Orang Dayak identik dengan Kristen sementara Melayu identik dengan Islam. Sebagian besar orang Dayak yang telah memeluk Islam menjadi Melayu. Sedangkan etnik Madura merupakan etnik pendatang. Sebagai pendatang, etnik Madura bukanlah pemukim baru, walaupun tidak ada data yang pasti kapan mulainya tetapi dapat diperkirakan sudah berlangsung sangat lama bahkan mungkin sudah ratusan tahun bersamaan dengan kehadiran orang Madura di Kalimantan Barat (Van Genep, dalam Sudagung, 1984). Pola pemukiman di Kabupaten ini tergolong tersegregasi mengikuti etnik dan agama masing-masing. Tiap etnik atau agama cenderung mengelompok seolah tidak ingin berbaur, dan cenderung membangun desa tersendiri.

Beberapa aspek perbedaan ketiga

etnik tersebut seperti dalam hal ideologis, ekonomi dan segregasi permukiman. Secara ideologis etnik Dayak memegang teguh kepercayaan agama Kristen sedangkan Melayu dan Madura beragama Islam. Perbedaan ideologi keagamaan ini sangat potensial mendorong timbulnya konflik seperti yang terjadi di Ambon, Sambas, Sampit dan Poso. Dalam bidang ekonomi walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok karena mereka pada umumnya adalah petani, namun etnik Madura tergolong sebagai pekerja yang ulet, gigih dan pandai mengolah tanah. Permukiman mereka tersegregasi berdasarkan etnik sehingga sebenarnya semakin menambah potensi konflik di antara mereka.

Bertolak dari uraian latar belakang itu maka masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola interaksi sosial Etnik Dayak, Melayu dan Madura di Kabupaten Ketapang; (2) Bagaimana modal sosial yang terdapat pada ketiga etnik tersebut; (3) Bagaimana pengendalian sosial intra dan interetnik di Kabupaten Ketapang. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan pola pengendalian sosial dalam masyarakat multikultural dan menjelaskan: (1) pola interaksi yang terjadi antara etnik Dayak, Melayu dan Madura di Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak; (2) modal sosial yang terdapat di masyarakat Kabupaten Ketapang; (3) pengendalian sosial intra dan antaretnik di Kabupaten Ketapang.

Penelitian Bahari (2006) tentang *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat*, dan Bahari (2007) tentang *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat* serta Bahari (2008) tentang *Pola Pengendalian Sosial Masyarakat Multikultural di Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Kalimantan Barat*, kesemuanya menunjukkan masyarakat lokal (adat) memiliki kearifan budaya dalam menyelesaikan konflik jika konflik domestik horizontal terjadi di tengah-tengah mereka. Ternyata masyarakat memiliki versi dan pola

sendiri dalam menyelesaikan konflik di samping versi dan pola pemerintah (negara). Masyarakat juga memiliki modal sosial lokal yang berpengaruh pada terciptanya harmoni. Secara umum kearifan budaya dan modal sosial lokal tersebut memiliki kelebihan dibandingkan modal sosial modern (pemerintah atau negara). Bahkan ada kecenderungan resolusi negara atau pemerintah yang berbentuk litigasi kurang menyentuh rasa keadilan masyarakat sehingga mengakibatkan konflik cenderung berulang, sebaliknya jika menggunakan pendekatan budaya lokal dapat menimbulkan ketentraman bagi masyarakat sehingga konflik dapat berkurang intensitasnya.

Menurut Taneko (1984: 70), pengendalian sosial (*social control*) sama artinya dengan pengawasan sosial yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Karena itu pengawasan sosial itu dapat bersifat preventif maupun represif, atau bahkan kedua-duanya.

Dalam kasus-kasus serius pengawasan sosial dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau penghukuman. Biasanya masyarakat itu sendiri telah menyediakan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berkisar mulai dari ekspresi tidak senang hingga pada pengasingan dari masyarakat.

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan dalam ilmu sosial untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial (harmoni). Kemampuan itu didefinisikan dalam banyak aspek kehidupan. Robert Putnam (dalam Purwana 2003: 142), mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) dan kepercayaan sosial yang mendorong terjadinya kolaborasi sosial (*koordinasi dan*

kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Bourdieu (dalam Purwana 2003: 114) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Modal sosial itu berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan timbal balik atau keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Bourdieu (2003: 115), juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lainnya, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya.

Bertolak dari uraian-uraian itu, modal sosial berkaitan erat dengan perdamaian maupun konflik kekerasan, tergantung pada modal sosial yang terbentuk. Di antara modal sosial dengan perdamaian dan konflik kekerasan, terdapat variabel antara, yaitu kohesi sosial. Kohesi sosial adalah terintegrasinya dimensi modal sosial pada tingkat horizontal dengan vertikal. Apabila modal sosial kuat, maka konflik kekerasan dapat dihindari. Namun sebaliknya, konflik kekerasan akan terjadi manakala kohesi sosial lemah. Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan inklusi, adanya *rule of law*, negara demokratis, akses dan persamaan terhadap kesempatan, birokrasi yang efisien dan tidak korup serta masyarakat yang terbuka. Sedangkan kohesi sosial yang lemah ditandai dengan eksklusivitas, negara yang otoritarian dan menindas, ketimpangan dan ketidakadilan, birokrasi yang tidak efisien dan korup serta masyarakat yang tertutup.

Dengan demikian modal sosial secara umum terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial, modal sosial dapat dibagi menjadi dua kategori yakni ikatan sosial (*social bonding*) dan jembatan sosial (*social bridging*).

Ikatan sosial adalah hubungan sosial

eksklusif yang berbasis pada kekeluargaan, kekerabatan, agama, suku, kedaerahan dan lain-lain. Sedangkan jembatan sosial adalah hubungan sosial yang bersilang atau *interseksi* yang bersifat plural dan inklusif: antaragama, antaretnik, antardaerah, antarkeluarga, dan lainnya (Sutoro, 2002: 18). Modal sosial yang perlu dikembangkan di masyarakat plural adalah modal sosial yang berfungsi sebagai jembatan sosial yang *interseksi*, bersifat plural dan inklusif.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Dayak, Melayu, dan Madura yang hidup di Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak, sedangkan objeknya adalah model pengendalian sosial yang membuat mereka rukun damai dan bisa hidup berdampingan, terhindar dari konflik kekerasan berulang yang sering terjadi di masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode studi kasus multi situs. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (Bogdan dan Taylor, 1993: 27). Metode pengumpulan data secara triangulasi atau *snowball*. Pengumpulan data akan dihentikan setelah peneliti menganggap semua informasi yang dibutuhkan sudah mencukupi atau tidak terjadi perbedaan pandangan lagi antara para informan terhadap objek yang diteliti.

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara mendalam diolah dengan memilah dan mengelompokkannya sesuai kategorinya sehingga tersusun data sesuai dengan kategorinya masing-masing. Data yang tersusun kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan berbagai pendapat atau teori yang tersedia atau diinterpretasikan dengan pendekatan emik dan etik.

II. PEMBAHASAN

A. Etnik Dayak dan Modal Sosialnya

Interaksi sosial terjadi dalam berbagai kegiatan intra dan inter keagamaan. Meskipun secara umum orang Dayak identik dengan agama Kristen tetapi tidak semua orang

Dayak beragama Kristen, ada juga di antara mereka yang memeluk agama Islam, dan bahkan masih ada yang memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian juga halnya dengan Melayu dan Madura, meskipun mereka diyakini mayoritas beragama Islam, ada juga di antaranya yang memeluk agama Kristen atau lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai tokoh dan pemeluk agama di Kabupaten Ketapang, interaksi sosial umat beragama baik yang bersifat intra maupun inter agama telah berjalan dengan baik.

Perkawinan antaretnik dan antaragama ini di satu sisi dapat menjadi sumber pemicu ketegangan namun di pihak lain dapat menjembatani (*bridging*) dalam meredakan ketegangan antaretnik dan agama. Jika perkawinan antaretnik dan agama itu mampu menjembatani dalam meredakan ketegangan yang muncul maka perkawinan tersebut berfungsi sebagai modal sosial dalam pengendalian sosial antaretnik.

Meskipun konflik antarwarga kadang juga terjadi, biasanya para pelaku ekonomi tidak serta merta terpengaruh. Apalagi dalam kegiatan ekonomi pasar yang para pelakunya saling tergantung akan berusaha menghindari diri dan saling melindungi.

Subetnik Dayak Ketapang tergolong masih memegang teguh adat istiadatnya. Walaupun berbagai subetnik itu memiliki perbedaan dalam tatacara penyelenggaraan adatnya, roh dan semangat penyelenggaraan adat itu tetap sama yakni keyakinan bahwa adat sebagai sarana menciptakan keseimbangan kosmos dan menghindari malapetaka.

Adat istiadat bagi orang Dayak Ketapang menjadi sumber kepercayaan, nilai dan sikap dan penentu perilakunya. Ungkapan pepatah *hidup di kandung adat, mati di kandung tanah* yang masih diterima secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kuatnya kepercayaan akan adat istiadat itu. Bagi mereka, orang yang tidak menghargai adat atau tidak beradat dikategorikan sama

dengan binatang dan adat istiadat itu pulalah yang membedakan kehidupan manusia dengan binatang.

Orang Dayak Ketapang umumnya berpandangan bahwa adat itu berlaku bagi semua orang yang hidup dalam komunitasnya, tanpa membedakan etnik dan agama, karena setiap pelanggaran yang dilakukan, terlepas oleh siapa atau dari mana orangnya, diyakini akan mendatangkan malapetaka kalau tidak diselesaikan mengikuti tatanan adat. Mereka juga memegang teguh prinsip: *di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*. Walaupun tatacara penyelenggaraan adat yang mereka anut berbeda tetapi mereka tidak mempermasalahkannya karena yang paling penting adalah motivasi menjaga keseimbangan alam atau menghindari malapetaka. Timbulnya kesan intimidasi atau pemaksaan hukum adat terhadap kelompok lain mungkin hanya kesalahpahaman akibat perbedaan persepsi yang dilandasi perbedaan latar belakang budaya. Mengatasi perbedaan persepsi itu memang diperlukan kearifan semua pihak, terutama bagi kelompok pendatang, karena dimanapun pendatang harus pandai-pandai menempatkan atau menyesuaikan diri, termasuk terhadap adat istiadat yang berlaku di mana dia berada.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya material masyarakat Dayak Ketapang (rumah panjang) sudah kurang terpelihara sedangkan budaya non materialnya (adat istiadat) masih terpelihara dengan baik. Budaya non material yang berupa hukum adat itu pada dasarnya berfungsi sebagai modal sosial dalam pengendalian sosial. Dalam hal pengendalian sosial digunakan modal sosial berupa pranata adat (hukum adat).

B. Etnik Melayu dan Modal Sosialnya

Sebagaimana halnya etnik Melayu umumnya di Kalimantan Barat, secara sosio-historis, etnik Melayu Ketapang juga dikenal sebagai etnik asli Kalimantan Barat. Dalam catatan sejarah, nenek moyang keduanya diyakini berasal dari daerah yang sama yakni

Yunan (Cina Selatan), yang bermigrasi masuk ke Kalimantan Barat melalui proses transit di Indocina, jazirah Malaysia, Hainan, Taiwan dan Filipina. Namun demikian, walaupun asal daerahnya sama tetapi masa kedatangannya berbeda, dimana nenek moyang orang Melayu (Deutro Melayu) datang lebih belakangan.

Dari perspektif yang lain, proses terbentuknya etnik Melayu menjadi salah satu etnik asli di Kalimantan Barat bermula dengan adanya penyebaran agama Islam yang dibawa oleh orang Melayu dari Semenanjung Malaka dan Sumatera. Dalam Ensiklopedia Hindia Belanda dikatakan bahwa suku Dayak yang telah menganut agama Islam meninggalkan atau melepas identitas dirinya dan menjadi suku Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses Islamisasi sekaligus proses Melayunisasi di daratan Kalimantan Barat, terutama terhadap orang-orang Dayak (Hasanuddin dkk, 2000). Kedua proses ini mengakibatkan jumlah orang Dayak semakin berkurang, sementara orang Melayu sekaligus Islam semakin bertambah. Proses inilah yang membuat orang Melayu dapat menjadi "pribumi asli" yang sama kedudukannya dengan etnik Dayak. Proses ini pulalah yang menjadikan etnik Dayak dan Melayu, yang meskipun tadinya bertetangga, berasal dari rumpun dan latar belakang yang sama, dapat menjadi berbeda secara mendasar apabila memasuki kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya.

Terbentuknya istilah subetnik ini bukanlah membedakan mereka secara substansial tetapi hanya berkaitan dengan nama wilayah pemukiman, bahasa dan adat istiadat yang digunakan. Secara umum etnik Melayu menunjukkan pola sistem kebudayaan yang sama, seperti dikatakan oleh beberapa penulis, bahwa: (1) etnik Melayu Kalimantan Barat identik dengan Islam (Mahatir, 1985; Othman, 1995, La Ode, 1998, Alqadrie, 1997), (2) umumnya secara turun temurun bermukim di wilayah pesisir (La Ode, 1998; Hassanudin, 2000); (3) secara psikologis merasa dirinya sebagai orang Melayu yang

menggunakan bahasa Melayu.

Dalam sistem kekerabatan, orang Melayu menggunakan sistem kekerabatan bilineal atau paternal-maternal relative. Kekerabatan seperti ini tidak membedakan garis keturunan dari bapak atau ibu. Setiap orang dalam masyarakat Melayu menganggap dirinya mempunyai ikatan kekerabatan yang sama erat dan sama penting dengan kerabat sebelah bapak dan ibunya (Dollah, 1986). Sistem kekerabatan yang demikian itu tampaknya tidak terlepas dari pandangan Islam bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama kedudukannya di sisi Tuhan.

Kedekatan hubungan kekerabatan di kalangan etnik Melayu sangat tergantung sejauhmana hubungan kekerabatan tersebut dibina, seperti tergantung pada kedekatan lokasi tempat tinggal, kedekatan komunikasi, kedekatan emosional dan sebagainya. Etnik Melayu mengenal hirarkhi kekerabatan seperti tergambar dalam penyebutan garis keturunan atau kedudukannya di dalam keluarga. Sistem kekerabatan di kalangan etnik Melayu dibina melalui kelompok keluarga besar sampai dua atau tiga generasi, baik vertikal maupun horizontal menjadi kelompok sosial yang memegang peranan melestarikan tradisi dan adat istiadat. Misalnya posisi keluarga yang tertua sangat dihormati dan dijunjung tinggi karena senioritas dan kewibawaannya. Secara religi orang Melayu dikenal sebagai penganut Islam yang taat, yang dianut mereka secara turun temurun. Syariat Islam atau ajaran Islam menjadi pedoman tingkah laku mereka sehari-hari dalam berperilaku dan beraktivitas di manapun. Ajaran Islam yang sangat berpengaruh kepada orang Melayu bermula dari ajaran Islam yang bersifat konvensional di bawah tarekat Naqsyabandiah.

Di kalangan muda orientasi kehidupan lebih bersifat kontekstual dan sesuai kenyataan aktual. Pada awalnya terjadi pertentangan antara kelompok tua dengan kelompok muda, mereka masing-masing berpegang kokoh kepada pandangannya.

Namun seiring perjalanan waktu akhirnya terjadi kesepahaman, bahwa ajaran yang mereka anut sama-sama merujuk kepada ajaran Islam, keduanya dianggap sama-sama menjalani syariat Islam yang benar.

Pada masa kini, walaupun secara bertahap telah terjadi pergeseran orientasi nilai keagamaan di kalangan orang Melayu, tetapi ajaran-ajaran yang bersifat tradisional masih mewarnai sikap mental perilaku mereka. Dalam hal ini ajaran Islam dipahami hanya sebatas nilai-nilai normatif terutama jika untuk menentukan baik-buruk dan benar-salah sesuatu. Ajaran Islam dijadikan pijakan dan patokan berperilaku bagi orang-orang Melayu, sehingga seluruh sendi kehidupan mereka mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena itu, dapat dikatakan bahwa adat istiadat orang Melayu sesungguhnya adalah Islam atau sangat sulit dipisahkan dengan Islam.

Walaupun secara sosiologis mereka diidentifikasi sebagai Melayu Ketapang, pada prinsipnya adat istiadat mereka sama, yaitu berlandaskan pada ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan etnik Melayu, tidak ditemukan istilah adat (hukum adat) di kalangan mereka, kecuali adat yang berlandaskan ajaran agama (Islam). Menurut tradisi adat yang bersumber pada ajaran Islam, maka jika terjadi konflik atau pertikaian di antara mereka maupun antara mereka dengan kelompok lain (etnik lain), jalan penyelesaian yang ditempuh adalah melalui adat musyawarah.

Mekanisme penyelesaian konflik itu dilakukan atas inisiatif dari para "pemimpin" (kepala desa, pemangku adat, sesepuh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama) biasanya dimotori oleh kepala desa dan pemangku adat. Menurut keterangan berbagai informan penelitian, adat musyawarah di kalangan etnik Melayu itu dilakukan hanya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berskala kecil seperti perkelahian atau pertengkaran yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk konflik-konflik yang menimbulkan korban jiwa

penyelesaiannya diserahkan langsung kepada aparat negara (polisi) dengan menggunakan hukum nasional.

Sedikit mengalami masalah jika konflik itu dengan orang Dayak dan di wilayah administratif hukum adat Dayak, dan konflik tersebut menimbulkan darah atau korban jiwa, maka penyelesaiannya tidak dapat sesederhana itu. Bagi orang Dayak sepanjang konfliknya terjadi di wilayah administratif hukum adat Dayak maka penyelesaiannya harus menggunakan hukum adat Dayak, dan apabila tidak diselesaikan menurut tatacara hukum adat Dayak maka masalahnya dianggap belum selesai.

C. Etnik Madura dan Modal Sosialnya

Secara umum orang Madura yang ada di Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang tidak berbeda dengan yang tinggal di Pulau Madura. Pada dasarnya mereka masih mengembangkan adat istiadat dan budaya Madura. Mereka juga mengembangkan pemukiman tersendiri dan cenderung mengelompok dengan sesama orang Madura. Bahkan di beberapa tempat mereka dinilai cenderung eksklusif. Kapan sebenarnya orang Madura pertama kali masuk ke Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang memang agak sulit dipastikan waktunya.

Melalui perantara perdagangan ini, para pemilik perahu-umumnya mereka juga merangkap sebagai pedagang-mengetahui bahwa daerah Kalimantan Barat masih berupa hutan, yang perlu diolah. Mereka juga mengetahui bahwa Kalimantan Barat sangat kekurangan tenaga kerja untuk membuka hutan menjadi yang berbadan sehat dan kuat. Kesulitan hidup di Madura, ditambah semangat migrasi untuk memperbaiki hidup, membuat propaganda migrasi itu sangat menarik.

Di Kalimantan Barat orang Madura itu bekerja dengan orang Melayu, Bugis atau keturunan Arab. Mereka inilah yang sering menebus uang tambang kepada para saudagar atau juragan Madura. Migran Madura yang datang pertama kali, setelah bergelut dengan penderitaan dan kepayahan

hidup selama bertahun-tahun, menunjukkan keberhasilan. Mereka yang berhasil mulai kerasan tinggal di Kalimantan Barat, sebagian ada yang sudah beristeri, sebagian lagi masih bujangan. Mereka yang masih bujangan banyak juga yang kawin dengan gadis sesama migran Madura atau dengan penduduk setempat keturunan Melayu.

Salah satu faktor yang mendorong orang Madura sanggup menjalani hidup menderita di tanah rantau adalah sifat malu atau rasa malu yang dalam bahasa madura disebut *todus*. Perasaan malu itu diungkap dalam ungkapan: *ango'an poteya tolang, etembang potea mata* (lebih baik putih tulang, dari pada putih mata), yang artinya lebih baik mati dari pada malu. Karena takut malu maka mereka berjuang gigih sekuat tenaga dengan bekerja rajin, tekun dan ulet. Alasan mereka dalam perjuangan itu adalah kondisi fisik mereka yang kuat dan *tahan cuaca*. Kesanggupannya serta keikhlasannya untuk menderita, disertai sifat hemat dan kebiasaan menabung, membuat mereka berhasil.

Ungkapan ini menunjukkan adanya pandangan tentang harga diri atau martabat orang Madura yang sangat tinggi. Harga diri atau martabat yang tinggi ini di satu sisi berdampak positif bagi kehidupan mereka, terutama dalam bidang pekerjaan (ekonomi). Karena memiliki rasa harga diri atau martabat atau rasa malu yang tinggi mereka cenderung bekerja keras, tekun dan ulet. Kerja keras, tekun dan ulet yang didorong oleh rasa malu ini yang membuat mereka berhasil dalam ekonomi (pekerjaan). Tetapi rasa malu atau harga diri atau martabat tersebut juga yang mengantarkan mereka berbenturan dengan etnik lain, terutama ketika mereka memaknai rasa malu itu dengan *tindakan carok*.

Mengalirnya migran Madura ke Kalimantan Barat semakin menambah populasi mereka. Pemukiman mereka pun semakin menyebar ke pedalaman. Lama kelamaan mereka tidak hanya bekerja di sektor pertanian, tetapi juga di sektor informal perkotaan. Banyak di antara mereka yang

bekerja sebagai pembabat hutan, pengangkut tanah, pasir, batu dan lainnya.

Saat konflik kekerasan 1997 dan 1999 yang menyebabkan terusirnya orang Madura dari beberapa wilayah di Kalimantan Barat, dapat diperkirakan pada saat itu mereka sudah tersebar luas di berbagai daerah Kabupaten dan Kecamatan di Kalimantan Barat. Menurut hasil penelitian Sudagung tahun 1983, di Kalimantan Barat sudah terdapat sekitar 62.125 orang Madura yang tersebar di beberapa Kabupaten (Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sambas, Ketapang, dan Sanggau) dan banyak kecamatan di masing-masing Kabupaten itu. Sedangkan pada tahun 1997 atau 1999, menurut perkiraan beberapa informan, jumlah orang Madura di Kalimantan Barat diperkirakan sekitar 95.000 orang. Perkiraan tersebut mungkin mendekati kebenaran, karena berdasarkan hasil penelitian Purwana (2003), data pengungsi Madura dari Kabupaten Sambas saja yang diungsikan ke kota Pontianak sekitar 27.000 orang dan di Singkawang sekitar 7.500 orang. Itu berarti jumlah pengungsi orang-orang Madura pada kerusuhan itu sekitar 35.000 jiwa, belum termasuk mereka yang mengungsi ke rumah-rumah saudara atau keluarganya atau yang pulang ke Pulau Madura. Data tersebut belum termasuk jumlah pengungsi pada peristiwa konflik sebelumnya (tahun 1997) yang berasal dari Kabupaten Pontianak, Ketapang, Bengkayang, dan Sanggau, yang diperkirakan berjumlah 25.000 jiwa.

Walaupun orang Madura di Kabupaten Ketapang sudah banyak yang lahir dan dibesarkan di Kalimantan Barat, mereka umumnya masih menjalankan adat istiadat dan budaya Madura. Dalam komunikasi intraetnik, mereka menggunakan bahasa Madura, kecuali komunikasi dengan etnik lain, mereka menggunakan Bahasa Indonesia tetapi dengan logat atau dialek Madura.

Sebagaimana etnik Madura di Pulau Madura, orang-orang Madura di Kabupaten Ketapang juga membangun surau atau mesjid di setiap pemukiman mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa mereka memegang

nilai-nilai agama Islam yang kuat, sesuatu yang positif terutama dalam kehidupan religiusnya. Namun, banyak pengamat menyangkan sifat yang sudah baik itu tidak diimbangi ketika mereka berinteraksi didalam masyarakat. Ada kecenderungan ajaran agama yang mereka peluk tidak dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perilaku menyimpang orang Madura itu digambarkan dalam ungkapan orang Melayu: *kite nang nanam, die nang ngambe'nye* (kita yang menanam, dia yang mengambil hasilnya) atau *kacik ayam kite, basar ayam die* (sewaktu kecil ayam kita, setelah besar menjadi ayam dia). Dalam pandangan etnik lain, mereka juga bersifat eksklusif dalam kesehariannya, seperti enggan menunaikan salat bersama-sama dengan pemeluk Islam dari etnik-etnik lainnya.

Sebagian besar orang Madura di Kabupaten Ketapang bekerja sebagai petani (padi, sayur-mayur, beternak sapi, kambing, dan ayam). Petani Madura banyak yang berhasil, disebabkan mereka rata-rata telah memiliki pengetahuan dan teknologi bercocok tanam (yang diwarisi dari tempat asalnya pulau Madura), memiliki semangat yang ulet, tekun dan rajin. Hasil pertanian mereka banyak dijual di pasar-pasar. Kondisi sosial ekonomi orang Madura di Kabupaten Ketapang, secara umum relatif sama dengan etnik Dayak dan Melayu. Karena mereka pekerja yang ulet, rajin, tekun, hemat dan suka menabung maka banyak di antara mereka yang berhasil.

Salah satu yang membedakan orang Madura dengan orang Dayak dan Melayu, adalah dalam bidang pendidikan. Orang-orang Madura cenderung menyekolahkan anak-anaknya hanya di sekolah-sekolah agama sedangkan orang-orang Dayak atau Melayu bersekolah di sekolah-sekolah umum negeri. Jarang sekali mendapatkan anak-anak etnik Madura bersekolah di sekolah negeri kecuali di tempat tinggalnya tidak ada sekolah agama. Namun, temuan penelitian Sudagung (1983) menunjukkan masih banyak orang-orang Madura di Kalimantan Barat yang belum pernah bersekolah.

Orang-orang Madura di Kabupaten Ketapang sebagaimana orang-orang Madura di tempat lainnya (Pulau Madura), mengacu pada dua hal sebagai sumber kepercayaan, nilai dan sikap yang diyakini mereka yakni: *adat dan agama*. Dalam hal adat istiadat, salah satunya yang tampak adalah adanya keterkaitan orang Madura dengan *masa lampau* dan *masa depan* (akan datang). Wujud dari keterkaitan orang Madura dengan masa lampau itu dalam bentuk melaksanakan upacara peringatan terhadap leluhurnya. Kepercayaan terhadap masa depan terutama untuk kelangsungan kehidupannya diwujudkan dalam beberapa bentuk upacara. Upacara itu menandai seluruh gerak kehidupan masyarakat Madura dalam menjaga keutuhan hubungan kekerabatannya. Gerak kehidupan masyarakat Madura yang demikian itu mengakibatkan pentingnya arti kerukunan keluarga besar mereka yang berintikan *somah*.

Namun demikian, praktek *sinkretisme* juga tampak dalam kehidupan beragama orang-orang Madura di Kalimantan Barat. Selain sebagai penganut Islam yang taat mereka juga melaksanakan tradisi (adat) *pemujaan* terhadap leluhur. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang Madura yang memiliki ilmu kekebalan. Menurut pengakuan beberapa informan pelaku konflik kekerasan, banyak tokoh Madura yang kebal terhadap senjata tajam atau senjata api, sehingga sangat sulit ditaklukan pada saat terjadi konflik terbuka.

Orang Madura memiliki adat istiadatnya yang khas, dalam hal keluarga mereka mengenal sistem keluarga besar (*extended family*). Dengan sistem yang demikian, anak-anak perempuan yang sudah kawin harus tinggal serumah dengan orang tuanya. Itulah sebabnya mengapa orang Madura sangat tidak menerima kalau anak wanita atau isterinya diganggu orang lain, karena memang dari adat istiadatnya mereka cenderung memberikan proteksi yang tinggi terhadap kaum wanita (anak wanita atau isteri). Adat istiadat Madura yang lain

berkaitan dengan *martabat* (harga diri). Dalam keluarga Madura suami merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam hubungan suami isteri, di kalangan orang Madura dikenal istilah *dayus*, di mana suami sudah tidak memiliki harga diri lagi bilamana sang isteri berselingkuh dengan orang lain. Bila hal itu terjadi, isteri atau laki-laki atau kedua-duanya lebih baik dibunuh.

Kawin muda bagi perempuan Madura di Kabupaten Ketapang, merupakan adat atau tradisi yang masih dipelihara. Bagi keluarga Madura ada semacam kebanggaan jika dapat mengawinkan anaknya pada usia masih muda, karena dianggap "anak mereka cepat laku" dan "mengurangi beban orang tua". Sementara dari pihak laki-laki ia merasa aman karena wanita idamannya tidak dikawini atau dijadikan isteri oleh pria lain. Walaupun ada adat atau tradisi kawin muda di kalangan wanita Madura, tetapi mereka tidak langsung melaksanakan hubungan seksual suami isteri. Sang isteri "*dipelihara terlebih dahulu*"; dalam arti tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sendiri, sampai ia mengalami *haid atau menstruasi*.

Organisasi sosial yang ada dalam setiap masyarakat dimanapun sangat penting terutama dalam memandu anggota-anggotanya untuk mempersepsi dan memahami dunia serta menentukan bagaimana mereka harus berinteraksi di dalamnya. Organisasi sosial informal itu berbentuk *keluarga* dan *lembaga lembaga adat*. Organisasi yang bersifat formal adalah *pemerintah*. Kedua organisasi inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan dan persepsi orang-orang Madura tentang dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengannya.

Organisasi keluarga dalam masyarakat Madura di Kabupaten Ketapang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Sama seperti sistem kekerabatan pada masyarakat Dayak Ketapang, masyarakat Madura juga mengenal sistem kekerabatan yang seimbang dari pihak ayah (*patrilineal*) dan dari pihak ibu (*matrilineal*). Namun dalam

prakteknya sistem kekerabatan orang Madura lebih berat kepada pihak ayah (*patri-lineal*).

Selanjutnya sistem kekerabatan orang Madura di Kabupaten Ketapang ini sama dengan sistem kekerabatan orang-orang Madura yang ada di Pulau Madura. Pemisahan tempat tinggal yang berjauhan tampaknya tidak memengaruhi perubahan sistem kekerabatan mereka. Hal ini dapat dipahami karena orang-orang Madura di Kalimantan Barat, terutama generasi-generasi yang tua, masih tetap berhubungan (kontak) dengan saudara-saudaranya di Pulau Madura. Bahkan semacam ada kebiasaan dari orang-orang Madura untuk selalu mudik ke kampung halamannya di Pulau Madura terutama pada hari-hari raya keagamaan.

Masyarakat Madura di Kabupaten Ketapang juga mempunyai suatu organisasi sosial yang berperan dalam mengatur berbagai masalah kehidupan bermasyarakat yang berupa lembaga keadatan. Lembaga ini biasanya mengatur masalah-masalah hubungan sosial internal etnik Madura, misalnya jika akan terjadi pernikahan, kematian, pesta dan sebagainya. Pengurus adat mereka biasa disebut *po' sepo*.

Pandangan orang Madura di Kabupaten Ketapang tentang keberadaan diri mereka, sifat dan wataknya memengaruhi persepsi mereka terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial dimana mereka berada. Mata pencaharian orang Madura sangat beragam, tetapi sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan sebagian lagi di sektor-sektor informal perkotaan.

Tekanan hidup yang sangat sulit di Pulau Madura dan jenis pekerjaan mereka yang cenderung sebagai pekerja kasar ditambah tingkat pendidikan yang rendah membuat watak mereka *keras*. Karena tekanan hidup yang sulit itu membuat mereka harus berjuang keras agar dapat hidup lebih baik. Kondisi seperti inilah yang membuat mereka berorientasi pada pekerjaan dan uang. Walaupun sistem pemukiman mereka di Kabupaten Ketapang tidak mengikuti

seratus persen sistem pemukiman *kampung meji* atau *tanean lanjang* atau *pamengkang*, tetapi sistem pemukiman mereka yang mengelompok dan eksklusif serta adanya perasaan senasib sepenanggungan hidup di rantau diperkirakan ikut membentuk rasa kolektivitas di antara mereka itu. Rasa kolektivitas inilah yang membentuk solidaritas sosial mereka, sehingga ketika salah satu anggota mereka disakiti maka yang lain merasa ikut merasakannya. Rasa solidier keetnikan mereka menjadi semakin kuat ketika mereka berhadapan dengan *moso* (musuh) yang mengancam. Dalam konteks konflik kekerasan Dayak-Madura yang terjadi berulang kali, etnik Dayak Ketapang dianggap sebagai *moso*, karena mengancam keberadaan mereka.

Solidaritas etnik Madura di Kabupaten Ketapang juga terkait dengan sistem kekerabatan di antara mereka serta adanya budaya *todus*. Budaya *todus*— sebagaimana dijelaskan di atas — membangkitkan semangat pembalasan dari kerabat ketika harga diri atau martabat atau *todus* keluarga dilecehkan orang lain. Ada semacam perasaan tidak berguna bagi keluarga atau kerabat kalau tidak mampu membalaskan *todus* yang dialami anggota keluarga atau kerabat tersebut.

D. Pola Pengendalian Sosial Intra dan Antaretnik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengendalian sosial di masyarakat multikultural Kabupaten Ketapang ada yang bersifat *preventif* dan *represif*. Pengendalian Sosial yang bersifat *preventif* (pencegahan) merupakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Pengendalian sosial yang bersifat *represif* (penindakan) adalah pengendalian sosial yang dilakukan atas pelanggaran nilai dan norma yang membahayakan kehidupan bersama, wujudnya berupa pemberian sanksi atau hukuman kepada para pelanggar. Tujuannya adalah memberikan efek jera

kepada para pelanggar dan memberikan *shock* tetapi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran yang membahayakan dan mengancam kehidupan bersama. Sasaran akhirnya adalah terwujudnya kehidupan sosial bersama yang tertib, teratur dan damai. Sejauh yang teramati tampaknya pengendalian sosial represif di masyarakat Kabupaten Ketapang ini ada yang berwujud pemberian sanksi berupa penekaan hukuman adat dan sanksi hukum formal atau hukum negara.

Bagi etnik Dayak Ketapang, jika terjadi pelanggaran nilai dan norma kehidupan bersama maka sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa penekaan hukum adat Dayak Ketapang. Meskipun di tiap subetnik Dayak Ketapang kadar sanksi adat itu bisa berbeda satu sama lain, tetapi substansinya sama yaitu bahwa sanksi adat dikenakan sebagai usaha menciptakan terjadinya keseimbangan kosmos atau menghindari malapetaka yang dapat membahayakan kehidupan bersama. Adat bagi orang Dayak Ketapang, sebagaimana juga diyakini di kalangan etnik Dayak lainnya di Kalimantan Barat, adalah roh dan jiwa mereka sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya penghargaan terhadap adat sama halnya dengan penghargaan terhadap roh dan jiwa atau penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri, yang apabila adat dilanggar sama halnya melakukan penodaan atau pembunuhan terhadap roh dan jiwa atau kehidupan mereka. Orang yang baik adalah orang yang beradat, dalam arti menghormati kehidupan sesama. Orang yang tidak mengindahkan adat disebut tidak beradat sehingga derajatnya sama dengan hewan.

Kuatnya keyakinan bahwa pelanggaran terhadap adat dapat menciptakan ketidakseimbangan kosmos dan ketertiban hidup bersama yang pemulihannya hanya efektif melalui penekaan hukum adat menyebabkan, secara psikologis, orang Dayak Ketapang belum merasa tenang, dan tidak dapat menerima, jika penyelesaian pelanggaran adat tidak atau belum menggunakan hukum adat. Sebaliknya,

sebesar apapun pelanggaran terhadap adat, penyelesaiannya melalui hukum adat maka akan menenangkan dan segala sesuatunya dianggap telah selesai.

Bagi etnik Melayu dan Madura di Kabupaten Ketapang walaupun keduanya memiliki perbedaan tetapi secara umum jika terjadi pelanggaran adat di kalangan mereka, maka diselesaikan secara adat musyawarah yang adat itu berpatokan pada ajaran Islam (syariat Islam). Bagi kedua etnik ini syariat Islam menjadi sumber penentuan ukuran sanksi bagi mereka yang melanggar. Sanksi adat musyawarah bersendikan syariat Islam ini khususnya dikenakan terhadap pelanggaran yang ringan, sementara, untuk pelanggaran adat berat selalu diserahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan hukum nasional.

Bagi etnik Melayu dan Madura jika terjadi pelanggaran terhadap adat maka para pengurus adatnya mengambil inisiatif melakukan musyawarah untuk penyelesaiannya. Para pengurus adat itu biasanya para kiai, ustadz, kepala desa atau sesepuh dari kalangan mereka masing-masing. Karena ketaatan masyarakat Melayu dan Madura kepada syariat Islam maka segala keputusan yang diambil melalui musyawarah yang dipimpin oleh para pengurus adatnya selalu dipatuhi dan ditaati meskipun sanksi atas pelanggaran itu sendiri sangat berat.

Untuk pengendalian sosial represif dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Ketapang, para informan menyatakan bahwa selain menggunakan modal sosial lokal berupa hukum adat dan adat musyawarah yang bersendikan syariat Islam. Dilakukan juga melalui penegakan hukum formal atau hukum nasional, kepemimpinan etnik dalam forum komunikasi antaretnik, kepemimpinan agama melalui forum komunikasi umat beragama, dan kepemimpinan organisasi lintas SARA.

Penggunaan hukum formal biasanya dilakukan untuk menangani kasus-kasus besar yang bersifat lintas SARA. Penegakan

hukum formal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Keputusannya bersifat memaksa sehingga mampu menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum. Namun demikian penegakan hukum formal ini sering mengandung kelemahan karena cenderung hanya mengedepankan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan masyarakat.

III. PENUTUP

Modal sosial lokal yang terdapat pada masyarakat Dayak Ketapang berupa hukum adat, sedangkan yang terdapat pada masyarakat Melayu dan Madura berupa adat musyawarah bersendikan syariat Islam.

Pengendalian sosial secara *preventif* melalui modal sosial lokal yang bersifat *social bonding* pada masyarakat Kabupaten Ketapang berlangsung melalui kepemimpinan adat, kepemimpinan agama, forum komunikasi antaretnik, forum komunikasi umat beragama, dan kepemimpinan organisasi sosial lainnya.

Pengendalian sosial *represif* melalui modal sosial lokal yang bersifat *social bridging* pada masyarakat Kabupaten Ketapang berlangsung melalui hukum adat Dayak, adat musyawarah bersendikan syariat Islam dan penegakan hukum formal.

Sedangkan saran yang penulis berikan adalah Pengendalian sosial berbasis modal sosial lokal yang sudah berjalan baik pada masyarakat di Kabupaten Ketapang hendaknya tetap terpelihara dengan baik karena itu interaksi sosial hendaknya semakin diintensifkan dalam segala aspek kehidupan, dan Pemerintah dan tokoh masyarakat hendaknya menjadi fasilitator bagi terciptanya jembatan sosial (*Social bridging*) antaretnik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari. Y. (2006) *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian Fundamental, Dikti.
- . (2007) *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian Fundamental, Dikti.
- . (2008) *Pengendalian Sosial Masyarakat Multikultural di Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian Fundamental, Dikti.
- Bourdieu. P. dalam Purwana H. S. (2003) *Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999. Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak. Romeo Grafika.
- Giring. (2004) *Madura di Mata Dayak: Dari Konflik Ke Rekonsiliasi*. Yogyakarta.
- Lauer. R. H. (1993) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. (terj) Jakarta. Rieneka Cipta.
- Petebang. E. dan Eri. S. (2000). *Konflik Etnis di Sambas*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Putnam Robert. Dalam Purwana Hendarta Suta. (2003) *Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999. Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak. Romeo Grafika.
- Taneko. S. B. (1984) *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Rajawali. Jakarta.
- Tim Peneliti Untan. (2000) *Konflik Sosial di Kalimantan Barat: Perilaku Kekerasan Antara Etnik Dayak-Madura dan Melayu-Madura*, Laporan Penelitian, Untan Pontianak.